



Laporan Bulanan Sekretariat Utama
Bulan Juli
2025

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu penting karena bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga pemerintah mengimplementasikan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi SAKIP ini digunakan untuk mengobservasi dan menilai kinerja suatu instansi pemerintah. Badan Pangan Nasional menggunakan aplikasi SAKIP sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang dipergunakan. Sekretariat Utama yang bertugas mendukung manajemen Badan Pangan Nasional wajib mengisi aplikasi SAKIP. Pengisian aplikasi SAKIP ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan aktualisasi program atau kegiatan di Sekretariat Utama di sepanjang tahun 2025. Tahap berikutnya menyusun Laporan Bulanan Sekretariat Utama yang berisi aktualisasi dari aktivitas, program dan kegiatan yang terjadi di Badan Pangan Nasional. Laporan ini disusun secara bulanan sehingga pelaporan kegiatan atau program yang sudah berlangsung di bulan itu. Selain itu, bahan dan data yang dipakai pada aplikasi SAKIP ini menggunakan instrumen penilaian yang berpatokan dengan implementasi dan realisasi kegiatan atau program yang dilaksanakan. Hasil dari dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk laporan bulan berikutnya. Sekretariat utama mendapatkan alokasi berdasarkan aturan alokasi dalam BA 125 milik Badan Pangan Nasional dan uraian alokasi untuk Program Dukungan Manajemen serta diprioritaskan untuk pembayaran honor dan operasional kantor. Pemantauan atas penggunaan alokasi yang aturan dalam bulan Juli tahun 2025 harus tetap terlaksana agar efisien dan efektif. Kami berharap laporan ini bisa berguna untuk seluruh pihak dan sebagai referensi buat pemugaran aplikasi aktivitas kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan pada rangka menyajikan laporan.

Jakarta, Juli 2025

Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I: Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Metodologi Penyusunan Laporan	4
BAB II: Rencana Kerja Output	5
BAB III: Pelaksanaan Kegiatan	8
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	9
4.1 Kesimpulan	23
4.3 Rekomendasi	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Juli 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-7 Tanggal 18 Juli 2025	6
Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Juli Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama	9
Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Juli Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 12 – 22 Juli 2025 24

Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan 2025..... 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk masyarakat. Hal ini tergambar dari Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 yang menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipercaya masyarakat perlu mengatur akan kebijakan terhadap pangan. Pemerintah mengatur tentang kebijakan pangan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dijelaskan tentang tugas, susunan badan, dan tata kelola dari Badan Pangan Nasional.

Fungsi yang diutamakan untuk Badan Pangan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, Badan Pangan Nasional berfokus untuk mengatur kebijakan di bidang pangan. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan BUMN di bidang pangan dalam mengerjakan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah, Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sistem pangan nasional yang transparan, akuntabel, loyal dan berkelanjutan serta berkoordinasi dengan instansi-instansi lain baik itu kementerian-kementerian lain maupun universitas-universitas untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana visi Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022.

Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1 Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 2 Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi;
- 3 Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- 4 Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

Sekretariat Utama

Laporan bulanan dibuat Badan Pangan Nasional secara periodik sebagai bentuk implementasi instansi negara yang bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pemantauan, jejak program atau kegiatan yang telah terlaksana dan evaluasi yang menggambarkan pencapaian dan bentuk realisasi terhadap target kinerja organisasi dalam periode bulanan. Pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan pencapaian target dapat berjalan sesuai yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul di periode mendatang.

Hasil atas peninjauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan pendayagunaan anggaran kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Juli 2025 dituangkan

dalam bentuk laporan peninjauan dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Utama bulan Juli 2025. Laporan ini sebagai catatan dokumentasi realisasi fisik dan keuangan selama bulan Juli 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Sekretariat Utama tahun 2025 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan dan merepresentasikan program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat Utama di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Utama pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Sekretariat Utama periode bulan Juli 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target periode bulan Juli 2025.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

Metodologi penyusunan laporan meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dari Unit Kerja Eselon (UKE) 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II
RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja pada Sekretariat Utama selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Juli 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian Rincian Output (RO) dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-12 pada bulan Juli 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Juli ditargetkan sebesar **9,52%** Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Juli 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-12

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Alokasi Tahun 2025		Target Juli th. 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 9,52% (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen		113,891,082,000		10,842,430,000	-
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional					
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	824,972,000		78,537,000	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	325,011,000		30,941,000	
	Layanan Hukum	686,492,000		65,354,000	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,373,720,000		225,978,000	
	Layanan Protokoler	580,600,000		55,273,000	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000		101,849,000	
	Layanan Umum	7,844,720,000		746,817,000	
	Layanan Perkantoran	81,429,806,000		7,752,118,000	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1,314,054,000		125,098,000	

.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	1,887,686,000		179,708,000	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000		507,306,000	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000		73,485,000	
	Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000		104,153,000	
	Layanan Audit Internal	4,632,794,000		440,962,000	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000		25,778,000	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000		307,740,000	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	221,999,000		21,134,000	

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 53 output/RO dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 9,088,447,990,000,-** untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Juli Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 2 dan tabel 3 berikut:

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Juli Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama

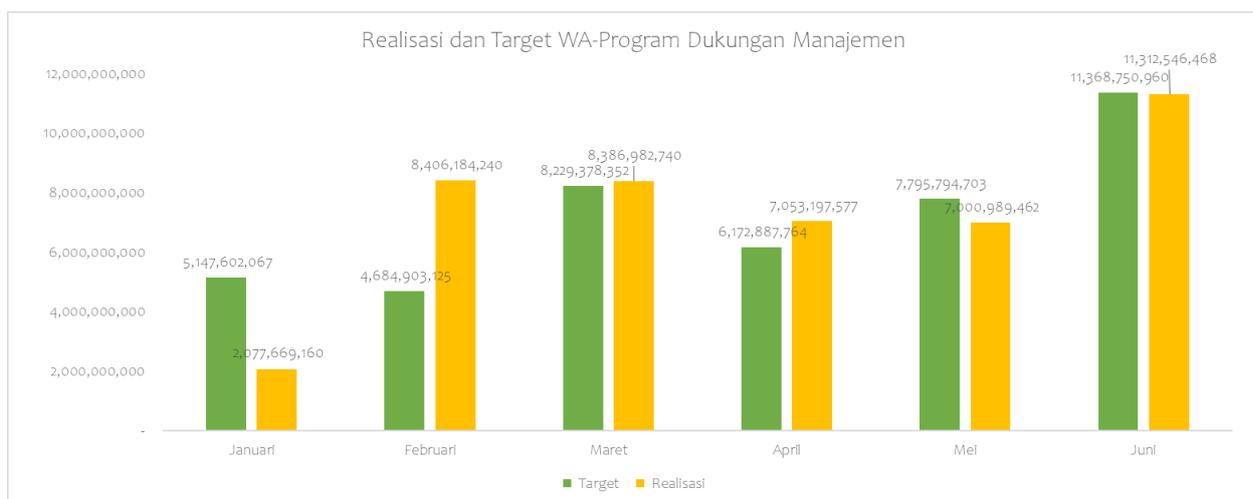
Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Target (9,52%)		Realisasi (Periode Juli)	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen					
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional		11,368,750,960		10,431,127,006	-
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	78,537,000		46,369,522	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	30,941,000		9,982,000	
	Layanan Hukum	65,354,000		108,048,304	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	225,978,000		224,587,436	
	Layanan Protokoler	55,273,000		85,785,848	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	101,849,000		141,526,500	
	Layanan Umum	746,817,000		907,523,630	

	Layanan Perkantoran	7,752,118,000		7,432,442,784	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	125,098,000		0	
.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	179,708,000		256,960,115	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	507,306,000		374,052,488	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	73,485,000		85,462,972	
	Layanan Manajemen Keuangan	104,153,000		115,664,200	
	Layanan Audit Internal	440,962,000		287,551,833	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	25,778,000		51,707,340	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	307,740,000		303,462,034	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	21,134,000		0	

Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Juli Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

Program dan Kegiatan	Target 9,52% (Rp)	Realisasi Juli (Rp)	% (Dari Target)
Badan Pangan Nasional	865,220,248,648	1,656,484,320,048	191.45%
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	854,377,817,642	1,654,461,540,182	193.65%
WA-Program Dukungan Manajemen	10,842,431,006	10,431,127,006	96.20%

Dari tabel 3 diatas, realisasi keuangan Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Bulan Juli Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 10,431,127,006 (96,20%) dari target sebesar Rp. 10,842,431,006 (9,52%). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka target, realisasi dan PAGU WA-Program Dukungan Manajemen akan terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Realisasi dan Target Sekretariat Utama Tahun 2025

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan Juli Tahun 2025 telah ter-realisis anggaran sebesar [Rp.10,431,127,006,-](#) dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

Sekretaris Utama

2 Juli 2025 - Perkuat Tata Kelola Sistem Pangan, NFA Jajaki Kerjasama Dengan Mitra Pembangunan Internasional



Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menjajaki kerja sama strategis dengan mitra pembangunan internasional, Agence Francaise de Development (AFD) dalam rangka memperkuat tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Pertemuan resmi antara kedua pihak digelar di Kantor NFA, dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Pertemuan ini merupakan langkah awal kolaborasi internasional dalam mendukung ketahanan pangan nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Dalam periode 2025–2029, NFA menetapkan sejumlah kebijakan strategis prioritas, di antaranya memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan, mengoptimalkan pengelolaan sisa pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, mengentaskan

daerah rentan rawan pangan, serta menjamin keamanan dan mutu pangan segar,” ujar Sarwo.

Lebih lanjut, Sarwo menyampaikan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk mendorong akselerasi transformasi sistem pangan nasional yang adaptif terhadap tantangan global, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik.

“Sinergi dengan AFD membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal serta mendukung tujuan besar Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Perwakilan AFD Indonesia, Matthieu Legrix, menyatakan bahwa AFD terus memperkuat komitmennya dalam mendukung Indonesia mencapai pembangunan yang rendah karbon, adil, dan tangguh. Sejak membuka kantor perwakilannya di Jakarta pada 2007, AFD telah menjadi mitra strategis Indonesia di berbagai sektor pembangunan.

“AFD berperan aktif dalam empat pilar utama transisi pembangunan Indonesia, yaitu: transisi energi rendah karbon, perlindungan sumber daya alam dan laut, penguatan infrastruktur perkotaan, serta transisi keuangan hijau,” ujar Matthieu.

“Kami melihat Indonesia sebagai mitra utama dalam mendorong perubahan menuju masa depan yang hijau dan inklusif. Melalui kerja sama yang erat dan berkelanjutan, AFD siap mendukung visi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon yang adil dan tangguh,” lanjutnya.

NFA terus berkomitmen memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

Melalui kerja sama ini, NFA berharap ketahanan pangan nasional semakin kokoh sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain strategis dalam pasar pangan global menuju visi Indonesia Emas 2045.

7 Juli 2025 - Dukungan Senator DPD RI, NFA Optimis Perkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah



JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai salah satu strategi utama membangun ketahanan pangan nasional berbasis ketahanan pangan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta, Senin (7/7/2025).

Sarwo menekankan bahwa penguatan cadangan pangan di tingkat daerah merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. “Pasal 23 UU Pangan secara jelas mengatur tentang cadangan pangan nasional yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat,” kata Sarwo.

Menurut Sarwo, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berfungsi sebagai intervensi nasional, seperti dalam program bantuan pangan beras yang akan segera digulirkan. Sementara itu, CPPD memiliki peran strategis sebagai buffer stock di level lokal, terutama saat mengantisipasi/menghadapi kondisi darurat, bencana, atau gejolak harga.

Sarwo juga menyoroti pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat kapasitas pangan daerah. Ia menekankan bahwa cadangan pangan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga terkelola dengan baik hingga ke level desa. Kuncinya ada di manajemen yang solid dan kolaborasi yang kuat. “Jika cadangan pangan kuat di level kabupaten, maka provinsi dan nasional pun akan kokoh,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa NFA telah menjalin koordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri yang mendorong setiap pemda mengembangkan produksi dan konsumsi pangan lokal berbasis potensi wilayah masing-masing. Hal ini menurutnya dapat mendukung penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berbasis potensi dan sumber daya lokal.

Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus BAN Liow, menyampaikan bahwa forum RDP ini menjadi sarana penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, agar lebih adaptif terhadap kondisi wilayah.

“DPD RI hadir untuk menjembatani dan menggali masukan dari kementerian dan lembaga teknis dalam isu-isu strategis seperti pangan, pertanian, dan gizi. Tujuan utamanya adalah memastikan kebijakan yang lahir benar-benar dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan keadilan regulatif dan kesinambungan hukum” kata Stefanus.

Sarwo menyambut positif semangat kolaborasi yang ditunjukkan DPD RI. Ia juga menyampaikan pesan dari Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, yang mengapresiasi keterlibatan aktif DPD dalam membuka ruang dialog antar pemerintah untuk memperkuat tata kelola pangan nasional

“Kepala NFA meyakini bahwa sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci utama menciptakan sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Kami juga berharap dukungan Bapak Ibu Senator dalam mendorong pemda mengalokasikan anggaran yang memadai untuk CPPD secara berkelanjutan,” pungkas Sarwo.

7 Juli 2025 - Komisi IV DPR RI Dukung Penguatan Anggaran Badan Pangan Nasional



JAKARTA – Komisi IV DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan anggaran Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) untuk tahun anggaran 2026. Dukungan tersebut diberikan atas usulan tambahan sebesar Rp 16 triliun yang diajukan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Pagu indikatif saat ini sebesar Rp 79 triliun dan kami mengusulkan tambahan Rp 16 triliun untuk 2 fokus utama, yakni program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta bantuan pangan. Ini sangat penting, mengingat stok di Bulog perlu terus diperbarui dan kita sudah pelajari pola tahunan yang selalu berulang,” ungkap Arief.

Menurut Arief, kebutuhan intervensi pemerintah terhadap pasokan dan harga pangan terjadi secara periodik. “Pada Januari-Februari, produksi biasanya di bawah konsumsi. Maret-April merupakan masa panen raya. Sementara pada Mei hingga Juli, dibutuhkan upaya stabilisasi dan bantuan pangan, yang kemudian dilanjutkan dengan program SPHP menjelang akhir tahun, mengingat panen tidak terjadi serentak di seluruh wilayah,” papar Arief.

Mengutip data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), neraca produksi-konsumsi beras bulanan pada tahun 2025 mengalami defisit masing-masing 1,36 juta ton pada Januari dan 0,09 juta ton pada Februari. Sedangkan pada Maret dan April yang merupakan panen raya mengalami surplus masing-masing 2,49 juta ton dan 2,69 juta ton. Pada Mei surplus menurun menjadi 0,25 juta ton dan di Juni kembali defisit 0,32 juta ton.

“Kita berterima kasih kepada Menteri Keuangan juga karena sudah dialokasikan Rp 5 triliun untuk bantuan pangan stimulus ekonomi, stimulus ekonomi bulan Juni-Juli yang akan didobelkan di bulan Juli ini. Kami juga sudah mendapatkan approval dari Menteri Keuangan tentunya melalui Ratas bersama Bapak Presiden, dan Rakortas bersama Menko Pangan, itu Rp 1,3 triliun untuk stabilisasi pangan,” ungkap Arief.

Arief mengatakan, stok yang ada di Bulog sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi pangan, “Stok Bulog sangat mencukupi, sekitar 4,2 juta ton. Kenaikan harga beras sebesar 5 sampai 10 persen ini bisa kita atasi dengan intervensi stabilisasi. Pemerintah siap menjaga stabilitas pangan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arief juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati/Titiek Soeharto, beserta para pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI atas dukungan dan komitmen yang senantiasa diberikan kepada Badan Pangan Nasional.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Titiek Soeharto sebagai Ketua Komisi IV, serta seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI yang terus memberikan dukungan kepada Badan Pangan Nasional dalam menjalankan amanat Undang-Undang di sektor pangan, menjaga ketahanan pangan nasional,” tutur Arief.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai pentingnya anggaran yang tidak hanya bersifat manajerial, tetapi juga mendukung program yang terencana.

“Anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2026 memang sangat kecil sekali, hanya Rp 79 miliar dan itu memang sifatnya hanya untuk mendukung manajemen. Oleh karena itu, tadi di RDP, Kepala Badan Pangan Nasional mengajukan usulan tambahan, karena beliau kan juga punya konsep pemikiran perencanaan 1 tahun. Bagaimana kemudian Bapanas bisa punya perencanaan yang matang terkait program-program untuk tahun 2026,” ujar Alex.

Ia menambahkan bahwa argumentasi tersebut diterima dengan baik oleh Komisi IV DPR RI dan telah ditindaklanjuti dalam bentuk kesimpulan rapat yang mendukung usulan tambahan tersebut.

10 Juli 2025 - Penganggaran Terencana, NFA Usulkan 16,10 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional 2026



JAKARTA – Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan program bantuan pangan serta stabilisasi harga berjalan lebih terencana, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengusulkan anggaran sebesar Rp16,10 triliun untuk tahun 2026. Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran Rp16,02 triliun dan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp79,42 miliar.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya penganggaran sejak awal tahun agar pelaksanaan program tidak lagi bersifat reaktif. Selama ini, pengajuan anggaran untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kerap dilakukan setelah kondisi di lapangan terjadi, sehingga membutuhkan waktu dalam proses eksekusinya.

"Terkait bantuan pangan dan SPHP, pengajuannya selama ini selalu berdasarkan kondisi di lapangan dan itu memakan waktu. Idealnya, program seperti ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan," jelas Arief usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI pada Kamis (10/7/2025) di Senayan, Jakarta.

Arief mengungkapkan, untuk kebutuhan stabilisasi harga, dibutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun. Sementara untuk bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton. Karena itu, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan.

"Dengan anggaran yang disusun dari awal, intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran," kata Arief.

"Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan," tambahnya.

Terkait mekanisme peruntukan SPHP, Arief menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog harus digerakkan untuk menjaga harga tetap stabil. Stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton. Angka ini sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi.

"SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto dalam RDP tersebut menilai usulan anggaran NFA akan sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional ke depan.

"Besarnya harapan kami agar anggaran ini benar-benar mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Titiek Soeharto.

29 Juli 2025 - NFA Kukuhkan Pejabat Baru: Perkuat Kinerja dan Sinergi Pangan Nasional



Jakarta – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melaksanakan pelantikan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam upacara resmi yang digelar di kantor pusat NFA, Selasa (29/7/2025).

Pelantikan ini merupakan langkah strategis NFA dalam memperkuat struktur organisasi serta tindak lanjut dari Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini mencerminkan kepercayaan institusi kepada para pejabat dan pegawai yang baru diangkat.

“Pelantikan hari ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas kinerja, disiplin, inovasi, dan kolaborasi di lingkungan Badan Pangan Nasional. Saya berharap para pejabat dan PPPK yang dilantik dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh semangat dan dedikasi tinggi,” ujarnya.

Sarwo juga menyoroti peran vital Pejabat Pengawas, terutama Kepala Subbagian Protokol, yang berperan langsung dalam mendukung kelancaran tugas pimpinan serta memperkuat citra kelembagaan NFA.

Sementara itu, para Pejabat Fungsional dan PPPK diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pelaksanaan program-program strategis di sektor pangan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai ASN BerAKHLAK yang menekankan pada pelayanan

prima, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi.

“Kami mendorong seluruh pejabat dan pegawai untuk menjaga koordinasi, sinergi, dan komunikasi yang baik, demi mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional serta menjawab tantangan pembangunan pangan yang semakin kompleks,” tandas Sarwo.

Adapun pejabat yang dilantik dalam kesempatan ini yaitu Ginda Arthur sebagai Pejabat Pengawas/Kepala Subbagian Protokol, Rahmatia Garwan sebagai Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, Rico Falantino sebagai Pejabat Fungsional Auditor Ahli Pertama, dan Agus Setiawan sebagai PPPK Pengadministrasi Perkantoran di Biro Organisasi, SDM, dan Hukum.

Melalui pelantikan ini, Sarwo berharap para pejabat dan PPPK yang baru diangkat mampu menjadi motor penggerak perubahan positif di lingkungan kerja, sekaligus menjadi teladan dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Sekretariat Utama pada periode bulan Juli 2025 sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama adalah Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 113,891,082,000,- dari total pagu Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 9,088,447,990,000,- yang terdiri dari 6 Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 15 Rincian Output (RO).
2. Realisasi keuangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Juli 2025 mencapai Rp. 10,431,127,006 (96,20%) dari target sebesar 10,842,431,006 (9,52%)

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di Sekretariat Utama adalah masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa MAK, bahkan ada yang masih 0 realisasinya pada awal tahun dikarenakan anggaran masih belum bisa digunakan pada saat awal tahun.

4.3 Rekomendasi

Tindak lanjut atas permasalahan di atas antara lain:

1. Penyelesaian dokumen pendukung sebagai syarat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi ABT Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
2. Penyiapan SDM yang akan menangani pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk mendorong realisasi keuangan dapat mencapai target yang telah direncanakan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 12 Tanggal 22 Juli 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA - 125.01.1.690590/2025



Revisi ke 12
Tanggal : 22 Juli 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (125) | BADAN PANGAN NASIONAL |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | BADAN PANGAN NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Saker | : (690590) | BADAN PANGAN NASIONAL |
| Sebesar | : Rp. 9.195.879.083.000 | (SEMBELAN TRILIUN SERATUS SEMBELAN PULUH LIMA MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBELAN JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH) |

Urut kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	9.195.879.083.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 9.195.879.083.000 |
|-------------------|-----------|-------------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KIL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KIL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A. NI MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan Juli 2025

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT
Data s/d tanggal 11 Juli 2025

URAIAN	PAGU REVISI	LOCK PAGU	REALISASI PERIODE INI	REALISASI SP2D	%	REALISASI AKRUAL	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	9,088,447,990,000	0	1,666,915,447,054	2,471,640,086,998	27.20%	2,482,146,947,849	27.31%	6,616,807,903,002
W Program Dukungan Manajemen	113,891,082,000	0	10,431,127,006	56,078,948,210	49.24%	62,274,789,999	54.68%	57,812,133,790
WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan	113,891,082,000	0	10,431,127,006	56,078,948,210	49.24%	62,274,789,999	54.68%	57,812,133,790
AEC Kerja sama	824,972,000	0	46,369,522	309,210,304	37.48%	401,215,904	48.63%	515,761,696
AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan	824,972,000	0	46,369,522	309,210,304	37.48%	401,215,904	48.63%	515,761,696
101 Kerja Sama Bidang Pangan	824,972,000	0	46,369,522	309,210,304	37.48%	401,215,904	48.63%	515,761,696
101.0A Kerjasama di Bidang Pangan	824,972,000	0	46,369,522	309,210,304	37.48%	401,215,904	48.63%	515,761,696
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	94,310,610,000	0	8,909,896,502	49,164,972,402	52.13%	53,882,626,991	57.13%	45,145,637,598
EBA.956 Layanan BMN	325,011,000	0	9,982,000	205,494,535	63.23%	205,494,535	63.23%	119,516,465
101 Layanan BMN dan Pengadaan	325,011,000	0	9,982,000	205,494,535	63.23%	205,494,535	63.23%	119,516,465
101.0A Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan	153,140,000	0	0	94,970,200	62.02%	94,970,200	62.02%	58,169,800
101.0B Layanan Pengelolaan BMN	171,871,000	0	9,982,000	110,524,335	64.31%	110,524,335	64.31%	61,346,665
EBA.957 Layanan Hukum	686,492,000	0	108,048,304	222,584,835	32.42%	226,094,942	32.93%	463,907,165
101 Layanan Hukum	686,492,000	0	108,048,304	222,584,835	32.42%	226,094,942	32.93%	463,907,165
101.0A Layanan Hukum	351,350,000	0	94,381,610	172,063,735	48.97%	172,063,735	48.97%	179,286,265
101.0B Layanan Advokasi Hukum	166,542,000	0	12,086,694	48,941,100	29.39%	52,451,207	31.49%	117,600,900
101.0C Layanan Penguatan JDIH, IRH dan IKK	168,600,000	0	1,580,000	1,580,000	0.94%	1,580,000	0.94%	167,020,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,373,720,000	0	224,587,436	961,166,647	40.49%	1,034,966,653	43.60%	1,412,553,353
101 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,373,720,000	0	224,587,436	961,166,647	40.49%	1,034,966,653	43.60%	1,412,553,353
101.0A Layanan Humas dan Informasi Publik	2,373,720,000	0	224,587,436	961,166,647	40.49%	1,034,966,653	43.60%	1,412,553,353
EBA.959 Layanan Protokol	580,600,000	0	85,785,848	369,613,249	63.66%	369,613,249	63.66%	210,986,751
101 Layanan Protokol	580,600,000	0	85,785,848	369,613,249	63.66%	369,613,249	63.66%	210,986,751
101.0A Layanan Keprotokoleran	580,600,000	0	85,785,848	369,613,249	63.66%	369,613,249	63.66%	210,986,751
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000	0	141,526,500	349,304,760	32.64%	358,454,760	33.49%	720,956,240
101 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,070,261,000	0	141,526,500	349,304,760	32.64%	358,454,760	33.49%	720,956,240
101.0A Layanan Manajemen Organisasi dan Tatalaksana	458,791,000	0	131,717,000	202,900,070	44.22%	207,465,070	45.22%	255,890,930
101.0B Layanan Reformasi Birokrasi	188,150,000	0	8,955,000	44,820,000	23.82%	44,820,000	23.82%	143,330,000
101.0C Pengembangan Jabatan Fungsional	423,320,000	0	854,500	101,584,690	24.00%	106,169,690	25.08%	321,735,310
EBA.962 Layanan Umum	7,844,720,000	0	907,523,630	4,252,131,447	54.20%	5,384,835,447	68.64%	3,592,588,553
101 Layanan Umum	7,844,720,000	0	907,523,630	4,252,131,447	54.20%	5,384,835,447	68.64%	3,592,588,553
101.0A Layanan Rumah Tangga Pimpinan	3,778,806,000	0	434,600,691	2,404,519,479	63.63%	2,404,519,479	63.63%	1,374,286,521
101.0B Layanan Dukungan Kesekretariatan	3,127,701,000	0	363,678,514	1,538,924,559	49.20%	2,671,628,559	85.42%	1,588,776,441
101.0C Layanan Tata Usaha Biro	330,560,000	0	31,458,400	75,917,120	22.97%	75,917,120	22.97%	254,642,880
101.0D Layanan Tata Usaha Pimpinan	298,413,000	0	27,162,925	146,366,689	49.05%	146,366,689	49.05%	152,046,311
101.0E Layanan Persuratan dan Kearsipan	309,240,000	0	50,623,100	86,403,600	27.94%	86,403,600	27.94%	222,836,400
EBA.994 Layanan Perkantoran	81,429,806,000	0	7,432,442,784	42,804,676,929	52.57%	46,303,167,405	56.86%	38,625,129,071
001 Gaji dan Tunjangan	64,100,476,000	0	4,795,369,398	33,976,124,569	53.00%	35,962,212,805	56.10%	30,124,351,431
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	64,100,476,000	0	4,795,369,398	33,976,124,569	53.00%	35,962,212,805	56.10%	30,124,351,431
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	17,329,330,000	0	2,637,073,386	8,828,552,360	50.95%	10,340,954,600	59.67%	8,500,777,640
002.0A Administrasi Kegiatan	1,224,388,000	0	256,488,396	624,909,250	51.04%	624,909,250	51.04%	599,478,750
002.0B Terpeliharanya Kendaraan	2,248,257,000	0	830,109,346	36,929,346	36.92%	830,109,346	36.92%	1,418,147,654
002.0C Terbayarnya Layanan Telepon dan Listrik	66,000,000	0	35,000,000	35,000,000	53.03%	35,000,000	53.03%	31,000,000
002.0D Tenaga Teknis Lainnya	6,648,540,000	0	532,252,000	3,756,364,000	56.50%	4,959,316,000	74.59%	2,892,176,000
002.0E Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan	5,637,395,000	0	718,979,990	2,736,909,764	48.55%	3,046,360,004	54.04%	2,900,485,236
002.0F Pelantikan Jabatan	64,750,000	0	0	5,260,000	8.12%	5,260,000	8.12%	59,490,000
002.0G Dana Operasional Pimpinan	1,440,000,000	0	840,000,000	840,000,000	58.33%	840,000,000	58.33%	600,000,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,314,054,000	0	860,657,060	860,657,060	65.50%	860,657,060	65.50%	453,396,940
EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,314,054,000	0	860,657,060	860,657,060	65.50%	860,657,060	65.50%	453,396,940
101 Layanan Sarana Internal	1,314,054,000	0	860,657,060	860,657,060	65.50%	860,657,060	65.50%	453,396,940
101.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan	1,314,054,000	0	860,657,060	860,657,060	65.50%	860,657,060	65.50%	453,396,940
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1,887,686,000	0	256,960,115	657,313,802	34.82%	736,813,802	39.03%	1,230,372,198
EBC.954 Layanan Manajemen SDM Internal	1,887,686,000	0	256,960,115	657,313,802	34.82%	736,813,802	39.03%	1,230,372,198
101 Layanan Manajemen SDM	494,862,000	0	49,067,115	262,140,382	52.97%	262,140,382	52.97%	232,721,618
101.0B Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1,125,074,000	0	194,643,000	295,375,000	26.25%	295,375,000	26.25%	829,699,000
101.0C Layanan Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan	267,750,000	0	13,250,000	99,798,420	37.27%	179,298,420	66.96%	167,951,580
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	11,828,426,000	0	862,731,493	3,364,245,420	28.44%	3,557,326,520	30.07%	8,464,180,580
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000	0	374,052,488	938,367,561	17.61%	1,037,867,561	19.47%	4,391,314,439
101 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000	0	374,052,488	938,367,561	17.61%	1,037,867,561	19.47%	4,391,314,439
101.0A Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,329,682,000	0	374,052,488	938,367,561	17.61%	1,037,867,561	19.47%	4,391,314,439
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	0	85,462,972	239,284,157	31.00%	241,884,157	31.34%	532,619,843
101 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	0	85,462,972	239,284,157	31.00%	241,884,157	31.34%	532,619,843
101.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	771,904,000	0	85,462,972	239,284,157	31.00%	241,884,157	31.34%	532,619,843
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000	0	115,664,200	527,341,644	48.20%	538,822,744	49.25%	566,704,356
101 Layanan Manajemen Keuangan	1,094,046,000	0	115,664,200	527,341,644	48.20%	538,822,744	49.25%	566,704,356
101.0A Layanan Perbendaharaan	378,141,000	0	62,627,480	194,040,644	51.31%	203,642,244	53.85%	184,100,356
101.0B Layanan Akuntansi dan Verifikasi	383,850,000	0	24,500,000	198,912,000	51.30%	198,912,000	51.79%	186,938,000
101.0C Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan	182,734,000	0	13,073,000	45,293,000	24.79%	45,293,000	24.79%	137,441,000
101.0D Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan	149,321,000	0	15,463,720	91,096,000	61.01%	91,096,000	61.01%	58,225,000
EBD.965 Layanan Audit Internal	4,632,794,000	0	287,551,833	1,659,252,058	35.82%	1,738,752,058	37.53%	2,973,541,942
101 Layanan Audit Internal	4,632,794,000	0	287,551,833	1,659,252,058	35.82%	1,738,752,058	37.53%	2,973,541,942
101.0A Layanan Internal	383,094,000	0	107,695,523	225,990,762	58.99%	305,490,762	79.74%	157,103,238
101.0B Audit pada Satker lingkup Badan Pangan Nasional	560,000,000	0	0	220,767,715	39.42%	220,767,715	39.42%	339,232,285
101.0C Reviu Kegiatan Mandatori dan Kegiatan strategis	224,000,000	0	36,053,100	194,272,584	86.73%	194,272,584	86.73%	29,727,416
101.0D Tindak lanjut Hasil Pengawasan Internal/ External	152,000,000	0	20,925,100	31,470,200	20.70%	31,470,200	20.70%	120,529,800
101.0E Pemantauan atas Penerapan SPIP pada unit kerja	93,200,000	0	20,459,000	80,443,516	86.31%	80,443,516	86.31%	12,756,484
101.0F Pemantauan Penerapan SPIP Terintegrasi	120,000,000	0	0	81,591,860	67.99%	81,591,860	67.99%	38,408,140
101.0G Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	240,000,000	0	0	239,283,066	99.70%	239,283,066	99.70%	716,934
101.0H Penyusunan NSPK	59,300,000	0	21,495,110	21,495,110	36.25%	21,495,110	36.25%	37,804,890
101.0I Reviu Bantuan Pangan	1,370,000,000	0	80,924,000	563,937,245	41.16%	563,937,245	41.16%	806,062,755
101.0J Reviu Bantuan Pangan Beras Juni s/d Juli 2025	487,559,000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	487,559,000
101.0K Reviu Penyuluran Cadangan Pangan Pemerintah	943,641,000	0	0	0	0.00%	0	0.00%	943,641,000
PAD Peraturan Presiden	270,775,000	0	51,707,340	91,664,840	33.85%	91,664,840	33.85%	179,110,160
PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	0	51,707,340	91,664,840	33.85%	91,664,840	33.85%	179,110,160
101 Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan	270,775,000	0	51,707,340	91,664,840	33.85%	91,664,840	33.85%	179,110,160
101.0A Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan	270,775,000	0	51,707,340	91,664,840	33.85%	91,664,840	33.85%	179,110,160
QMA Data dan Informasi Publik	3,232,560,000	0	303,462,034	1,535,418,716	47.50%	2,579,089,216	79.78%	1,697,141,284
QMA.001 Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000	0	303,462,034	1,535,418,716	47.50%	2,579,089,216	79.78%	1,697,141,284
101 Layanan Data dan Informasi Pangan	3,232,56							